

**CASCADING KANTOR KECAMATAN TASIK PAYAWAN  
TAHUN 2024-2026**

| Tujuan RPD   | Indikator Tujuan RPD  | Sasaran RPD   | Indikator Sasaran Misi RPD                                    | Tujuan Renstra  | Indikator Tujuan Renstra | Sasaran Renstra  | Indikator Sasaran Renstra | Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Kinerja Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan (Sasaran)  | Indikator Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan  |  |
|--|---|---|---|---|--------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                        | 7  | 8                         | 9  | 10   | 11   |  |
| Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel | Indeks RB   | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat         | Indek kepuasan masyarakat (IKM)                               | Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tasik Payawan | Nilai IKM Kecamatan      | Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa | 1. IKM Kecamatan          | 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK<br><br>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan               | Meningkatkan kualitas pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa<br><br>Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | 1. Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)   |  |
|  |   |   |   |   |                          |  |                           | 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                              | Terlaksananya kegiatan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait   | 1.1.1 Terlaksananya kegiatan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait                               |  |
|  |   |   |   |   |                          |  |                           | 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Terlaksananya kegiatan peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan   | 1.1.2 Terlaksananya kegiatan peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan   |  |
|  |   |   |   |   |                          |  |                           | 2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  | 1.2 Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  |  |
|  |   |   |   |   |                          |  |                           | 1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum               | Terlaksananya kegiatan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum  | 1.2.1 Terlaksananya kegiatan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum                |  |
|  |   |   |   |   |                          |  |                           | 2. Prosentase hasil fasitiasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti  | 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Meningkatkan kualitas pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa   | 2. Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan |
|  |   |   |   |   |                          |  |                           | 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah  | 2.1 Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah  |  |
|  |   |   |   |   |                          |  |                           | 1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  | Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional  | 2.1.1 Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional  |  |
|  |   |   |   |   |                          |  |                           | 2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa   | Terlaksananya kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa   | 2.1.2 Terlaksananya kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa   |  |
|  |   |   |   |   |                          |  |                           | 3. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Terlaksananya kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional   | 2.1.3 Terlaksananya kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional |  |
|  | 4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Terlaksananya kegiatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 2.1.4 Terlaksananya kegiatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |   |                          |  |                           |  |  |  |  |

| Tujuan RPD | Indikator Tujuan RPD | Sasaran RPD | Indikator Sasaran Misi RPD | Tujuan Renstra | Indikator Tujuan Renstra | Sasaran Renstra                    | Indikator Sasaran Renstra   | Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Kinerja Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan (Sasaran)   | Indikator Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan   |
|------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|
| 1          | 2                    | 3           | 4                          | 5              | 6                        | 7                                  | 8   | 9  | 10  | 11  |
|            |                      |             |                            |                |                          |                                    | 3. Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA<br><br>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br><br>1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa<br><br>2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | Meningkatkan kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa<br><br>Terlaksananya fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa<br><br>Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa<br><br>Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa  | 3 Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar<br><br>3.1 Terlaksananya fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa<br><br>3.1.1 Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa<br><br>3.1.2 Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa   |
|            |                      |             |                            |                |                          | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | 1. Nilai SAKIP  | 4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA<br><br>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br><br>2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya<br><br>2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br><br>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br><br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br><br>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br><br>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br><br>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br><br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br><br>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br><br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br><br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah<br><br>Meningkatnya Kinerja Aparatur<br><br>Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN<br>Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian daerah<br>Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya<br>Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan<br>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor<br>Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga<br>Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan logistik kantor<br>Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan<br>Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat<br>Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 4 Nilai Lakiip<br><br>4.1 Meningkatnya Kinerja Aparatur<br><br>4.1.1 Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN<br>4.2 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah<br>4.2.1 Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya<br>4.2.2 Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan<br>4.3 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>4.3.1 Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>4.3.2 Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor<br>4.3.3 Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga<br>4.3.4 Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan logistik kantor<br>4.3.5 Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan<br>4.3.6 Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>4.4 Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>4.4.1 Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat<br>4.4.2 Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>4.4.3 Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor |

| Tujuan RPD | Indikator Tujuan RPD | Sasaran RPD | Indikator Sasaran Misi RPD | Tujuan Renstra | Indikator Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Indikator Sasaran Renstra | Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Kinerja Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan (Sasaran)  | Indikator Prorgam/Kegiatan/Sub Kegiatan  |
|------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---|--|--|
| 1          | 2                    | 3           | 4                          | 5              | 6                        | 7               | 8                         | 9   | 10   | 11   |
|            |                      |             |                            |                |                          |                 |                           | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan<br>Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya<br>Terlaksananya kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 4.5 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>4.5.1 Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan<br>4.5.2 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya<br>4.5.3 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya |





| Satuan    | Target    | Penanggungjawab                   |
|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b>                         |
| %         | 90.00%    | Kantor Kecamatan<br>Tasik Payawan |
| %         | 90.00%    | Kantor Kecamatan<br>Tasik Payawan |
| %         | 90.00%    | Kantor Kecamatan<br>Tasik Payawan |
| %         | 90.00%    | Kantor Kecamatan<br>Tasik Payawan |